

DITJEN PENDIDIKAN VOKASI: ANTARA TANTANGAN DAN HARAPAN

Oleh :

Ade Cahyana, M.Sc

Anggota BAN PAUD dan PNF

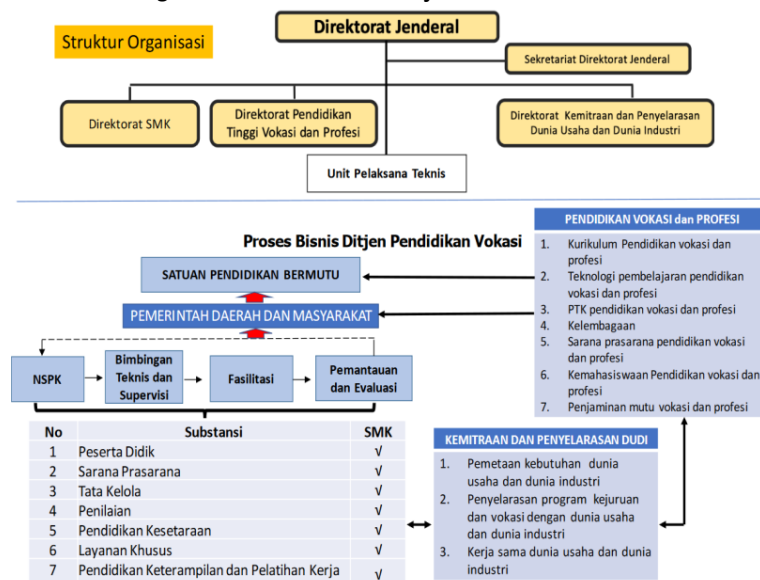
Akademisi pada Departemen Pendidikan Masyarakat

FIP - Universitas Pendidikan Indonesia

Saat Ditjen Pendidikan Vokasi diperkenalkan sebagai salah satu dari unit utama Kemendikbud, banyak orang berharap unit ini menjadi *braintrust* pengembangan SDM dari level menengah ke profesional. Dengan cara ini pemerintah dapat menghasilkan SDM berkualitas sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi pada masa kampanye. Memang agak unik Ditjen Pendidikan Vokasi ini. Sebab, sudah ada Direktorat Pendidikan Tinggi dan Vokasi pada jenjang pendidikan tinggi. Juga ada Direktorat SMK pada pendidikan menengah.

Yang lebih unik lagi ada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Bahkan ada yang nonjenjang yang berperan melaksanakan kemitraan dan penyelarasan pendidikan kejuruan, vokasi dan profesi dengan dengan dunia usaha dan dunia industri (Pasal 18, point 6). Jika diimplementasikan dengan maksimal, maka direktorat ini sungguh sangat strategis. Berikut disampaikan diagram yang menunjukkan proses bisnis Ditjen Pendidikan Vokasi disertai tugas dan fungsinya.

Diagram 1 : Proses Bisnis Ditjen Pendidikan Vokasi





Tabel 2
Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



Tugas: (Pasal 17)

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi.

Fungsi: (Pasal 18)

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan standar dan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
3. pelaksanaan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
6. pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
7. perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
9. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Memang struktur organisasi Ditjen Pendidikan Vokasi ini cukup unik. Di satu sisi, memiliki level kelembagaan unit utama yang setara dengan Ditjen Dikti. Namun dari sisi pengelolaan kelembagaan, pendidikan vokasi merupakan bagian dari manajemen pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Hal ini perlu menjadi perhatian Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI agar berfungsi menjadi *hub* yang efektif dalam menyelaraskan kebutuhan pasar untuk menghasilkan lulusan semi-profesional keluaran SMK, dan lulusan profesional dari pendidikan vokasi dan profesi. Caranya adalah dengan terlebih dulu mengkoordinasikan multi-level-manajemen antar jenjang yang ada di dalamnya. Hal ini merupakan tantangan awal yang mungkin saja bukan masalah. Namun bisa menjadi kendala internal kelembagaan yang harus diatasi untuk mengkoordinasikan *managerial-practices* antar jenjang agar berdampak positif pada *instructional-practices* kedua jenjang dan jenis pendidikan tersebut agar lulusannya sesuai dengan tuntutan pasar.

Untuk melihat tantangan yang sebenarnya mungkin kita bisa melakukan kajian fungsi kelembagaan Ditjen Pendidikan Vokasi dengan

menggunakan bagaimana semua fungsi tersebut didistribusikan pada setiap pendidikan/pelatihan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Fungsi Kelembagaan Ditjen Pendidikan Vokasi

No.	Kebijakan	Pendidikan Vokasi, PK, PKt, PPK	PK, PKt, PPK	Pendidikan Vokasi
1.	Merumuskan kebijakan bidang Pendidikan			
2.	Melaksanakan kebijakan penetapan std, QA sis/mhs, SP, TK			
3.	Melaksanakan kebijakan penetapan standar, QA PTK			
4.	Menyusun norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)			
5.	Memberikan Bimtek & Supervisi siswa SP, TK			
6.	Melaksanaan kemitraan & penyesuaian dgn DUDI			
7.	Merumuskan izin PTS			
8.	Evaluasi dan pelaporan			
9.	Melaksanakan Adm. Ditjen			
10.	Melaksanakan fungsi lain			

Keterangan: QA: Quality Assurance; PK : Pendidikan Kejuruan; PKt : Pendidikan Keterampilan; PPK : Pendidikan Pelatihan Kerja; SP : Sarana-Prasarana; TK : Tata-Kelola; Bimtek : Bimbingan Teknis.

Dari sisi karakteristiknya, fungsi nomor 1-5 merupakan fungsi perencanaan dan penyelenggaraan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat umum. Sementara fungsi nomor 7-9 merupakan fungsi administratif kelembagaan. Fungsi substantif yang mengandung harapan adalah fungsi nomor 6 tentang pelaksanaan kemitraan dan penyesuaian dengan DUDI yang bersifat **glondongan**. Juga fungsi nomor 10 sebagai fungsi **sapu-jagat** yang kemungkinan dapat digunakan untuk memperbaiki, menambahkan, dan menata ulang fungsi kelembagaan sambil berjalan. Tidak tampak fungsi substantif yang didelegasikan pada Ditjen Pendidikan Vokasi secara khusus, misalnya: melaksanakan peningkatan SDM industri strategis di bidang tertentu.

Dari sisi kelembagaan pendidikan, dari 10 fungsi yang melekat pada Ditjen Pendidikan Vokasi. Terdapat 5 fungsi yang digunakan bersama untuk Pendidikan Vokasi, Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Keterampilan, dan

Pendidikan Pelatihan Kerja; 2 fungsi untuk Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Keterampilan, dan Pendidikan Pelatihan Kerja; dan 3 fungsi untuk Pendidikan Vokasi. Ada kesan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mempercayai pendidikan kejuruan untuk secara independen melakukan kerja sama dengan mitra kerja pada fungsi nomor 6, dan lebih diarahkan untuk lebih fokus pada penyusunan NSPK, dan bimtek peserta didik serta sarana/prasarana.

Dari 10 fungsi Ditjen Pendidikan Vokasi, muncul pertanyaan pada fungsi mana niat untuk meneruskan mobil ESEMKA dulu yang dengan bangga dipromosikan sebagai karya anak bangsa unggulan dari sekolah kejuruan saat Pak Jokowi masih menjadi Walikota Solo? Lalu, kadung kagum dengan figur *young, smart, milenial* Mas Menteri, yang mantan CEO Gojek, mungkinkah ada eksperimentasi *reverse-engineering* atau *forward-engineering* dari model produk pengembangan SDM kekinian yang berhasil seperti Gojek, untuk dibedah skema arsitekturnya, direplikasi sekaligus dimodifikasi dan bahkan dalam proses pembentukannya mungkin dapat diberi muatan *top-up* dan inovasi kekinian untuk menjadi produk SDM lain yang sebanding dan laku dijual di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)?

Pertanyaan lain terkait bidang *entrepreneurship*, dimana fungsi mendidik dan melatih SDM yang profesional yang mampu secara kreatif menginisiasi bisnis baru dan mandiri serta punya prospek berkembang akan ditempatkan? Sejatinya banyak pertanyaan lain tentang kebutuhan SDM profesional yang belum terjawab jelas dengan melihat struktur organisasi Ditjen Pendidikan Vokasi dan fungsi-fungsi kelembagaannya.

Padahal persoalan SDM profesional kini menjadi tantangan utama yang dihadapi bangsa. Adalah tugas kita semua merubah tantangan tersebut menjadi harapan yang menjanjikan peluang keunggulan SDM bangsa ini. Semoga!